

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara yang telah lama dikenal dengan tingkat ketimpangan gender yang tinggi, masyarakat Jepang dikejutkan dengan dikeluarkannya kebijakan pro-gender dibawah pemerintahan Shinzo Abe pada periode yang kedua. Hal ini disebabkan karena Shinzo Abe berasal dari partai politik LDP (*Liberal Democratic Party*) yang sangat konservatif serta Abe juga aktif terlibat dalam organisasi Nippon Kaigi (kelompok ultranasionalis terbesar di Jepang) yang mempertahankan nilai tradisional dan menolak segala gerakan kesetaraan gender.

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Abe memilih untuk menangani masalah gender di negaranya melalui merevolusi sistem ekonomi Jepang pada tahun 2013 silam. Melalui revolusi tersebut, ia berharap dapat mendorong kenaikan tingkat partisipasi dari berbagai elemen masyarakat Jepang untuk berperan sebagai tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan. Abe menjanjikan suatu keadaan “*all women can shine*” melalui kebijakan reformasi struktural yang dikenal dengan istilah *womenomics* (Galli, 2016). Keberhasilan implementasi *womenomics* terlihat dari sejak tahun 2013 hingga 2019 tercatat bahwa persentase jumlah pekerja wanita pada usia 15 tahun keatas mengalami peningkatan dari 49% hingga mencapai 53%,

melebihi pertumbuhan rata-rata pekerja wanita pada negara-negara OECD<sup>1</sup> (The World Bank, 2021).

*Womenomics* berperan sebagai kebijakan domestik, disamping itu juga *womenomics* juga berperan sebagai fitur utama kebijakan luar negeri Jepang. Bagi Abe, partisipasi perempuan dalam segala sektor dapat memperbaiki citra Jepang di mata internasional. Disamping itu, fokus internasional pada isu '*comfort women*' yang juga telah melekat kuat pada Jepang dapat teralihkan. Secara proaktif Abe berusaha membalikkan pandangan tentang Jepang yang dinilai lambat dalam memberdayakan perempuan melalui program bantuan luar negeri dengan melibatkan perempuan (Coleman, 2017).

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2013, Abe menekankan bahwa partisipasi perempuan dalam perekonomian dapat memberikan keuntungan bagi negara berkembang, khususnya negara-negara di Afrika (Chanlett-Avery & Nelson, 2014). Abe juga akan memberikan bantuan pembangunan resmi (ODA)<sup>2</sup> lebih dari \$3 miliar selama tiga tahun ke depan dengan menargetkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan; perawatan medis untuk wanita; serta penyelesaian konflik yang terkait dengan perempuan (UN News, 2013). Sementara itu Amerika Serikat dan Jepang bekerjasama dalam menginisiasi program pendidikan bagi anak-anak perempuan di dunia. Perjanjian tersebut dilakukan pada pertemuan antara ibu negara AS yaitu Michelle Obama, Duta Besar

---

<sup>1</sup> *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* adalah organisasi ekonomi internasional dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

<sup>2</sup> *Official Development Assistance (ODA)* atau *Bantuan Pembangunan Resmi* adalah bantuan luar negeri yang mempromosikan dan secara khusus menargetkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang.

AS untuk Jepang yaitu Caroline Kennedy, dan ibu negara Jepang yaitu Abe Akie (Sekiguchi, 2015).

Berdasarkan uraian tentang tujuan *womenomics*, maka partisipasi perempuan dalam sektor publik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu tingkat domestik dan internasional. Adapun pada tingkatan tersebut terdapat beberapa peran, yaitu pada tingkat domestik: partisipasi sebagai tenaga kerja dan partisipasi dalam pemerintahan sebagai pembuat kebijakan (*policy making*). Sedangkan pada tingkat internasional, perempuan berpartisipasi dalam kebijakan luar negeri (*foreign policy*) dan sebagai aktor dalam *peace building* serta *gender mainstreaming*. Secara khusus, penelitian ini akan berfokus pada peran perempuan pada tingkat internasional yang akan disebut sebagai *gender mainstreaming*.

*Gender mainstreaming* dalam *womenomics* Jepang yang dibentuk pada pemerintahan Shinzo Abe melatarbelakangi penulisan ini untuk menelusuri dan menganalisis penyebab Shinzo Abe yang dinilai konservatif namun berani untuk menginisiasi sebuah kebijakan *womenomics* sekaligus menjadikannya fitur kebijakan luar negeri Jepang. Beberapa riset terdahulu berhasil menjawabnya, seperti pada penelitian yang ditulis oleh Liv Coleman (2017) menjelaskan bahwa tekanan internasional mendesak pemerintah Jepang agar segera mengubah politik domestik dan kebijakan luar negerinya sesuai dengan standar internasional. Namun demikian, penelitian ini mencoba menjawab melalui sudut pandang yang berbeda yaitu melalui pendekatan analisis idiosinkratik dalam melihat faktor apa yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan *womenomics* dan implementasi *gender mainstreaming* secara global.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan yaitu “Bagaimana faktor idiosinkratik Shinzo Abe berpengaruh terhadap *gender mainstreaming* dalam implementasi *womenomics*?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah tertulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1. Tujuan Umum**

- 1.3.1.1. Menjelaskan kebijakan *Womenomics* di Jepang dan kaitannya dengan *gender mainstreaming*.
- 1.3.1.2. Menjelaskan *gender mainstreaming* sebagai respon atas isu internasional.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- 1.3.2.1. Menjelaskan bagaimana kepribadian Shinzo Abe mempengaruhi kebijakan *womenomics* dan *gender mainstreaming*.
- 1.3.2.2. Menjelaskan tipe kepemimpinan Shinzo Abe dalam *gender mainstreaming*.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Akademis**

Penelitian ini membahas tentang upaya Shinzo Abe dalam melakukan *gender mainstreaming* sebagai respon atas berkembangnya isu internasional. Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangsih penelitian bagi ilmu hubungan internasional. Secara khusus untuk menambah penelitian yang membahas tentang kebijakan *womenomics* di Jepang dari sudut pandang yang berbeda, yaitu analisis idiosinkratik Shinzo Abe.

### **1.4.2. Praktis**

Sebagai kegunaan praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan dan saran bagi pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan gender dengan melibatkan partisipasi perempuan dalam segala bidang, khususnya politik dan pemerintahan.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Kajian Literatur**

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *womenomics* lebih banyak berfokus kepada peran *womenomics* sebagai kebijakan domestik Jepang dalam proses pemulihan ekonomi Jepang. Contohnya adalah penelitian “*Women and Work in Contemporary Japan: Deconstructing the “Crisis” of the Gender Order*” ditulis oleh Lilian Mai. Penelitian tersebut mendeskripsikan mengenai terjadinya perubahan tatanan gender dalam masyarakat Jepang yang

ditandai oleh peningkatan pendidikan perempuan serta keterlibatannya dalam dunia kerja (Mai, t.t.). Persamaan penelitian dengan skripsi ini adalah keduanya membahas kondisi kesetaraan gender, akan tetapi yang membedakan keduanya ialah penelitian ini akan menjelaskan tentang keterlibatan perempuan sebagai tenaga kerja merupakan kunci utama untuk kemajuan perekonomian Jepang khususnya pada masa jabatan Shinzo Abe.

Kemudian literatur yang kedua berjudul “*Womenomics* sebagai Mekanisme Peningkatan Peran Perempuan di Jepang” ditulis oleh Andrian Saputra. Dalam penelitiannya tersebut, Andrian menjelaskan mengenai *Womenomics* sebagai kebijakan responsif gender yang menunjukkan progress positif sebagai ukuran keberhasilan kebijakan tersebut. Namun, dari segi kondisi sosial masih mengalami hambatan karena adanya benturan budaya di Jepang (Saputra, 2016). Adapun persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah keduanya membahas mengenai *womenomics* sebagai kebijakan responsif gender di Jepang, namun yang membedakan adalah pada penelitian ini membahas *womenomics* sebagai respon isu internasional.

Literatur yang ketiga berjudul “*Towards Sustainable Society: Womenomics and Women Employment in Japan*” ditulis oleh Bintang Aulia dan Kurniawaty Iskandar. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *Womenomics* hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, namun mengabaikan masalah sebenarnya yang dihadapi oleh perempuan dan seharusnya mendapatkan penanganan (Aulia & Iskandar, 2021). Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang kebijakan *Womenomics* untuk memulihkan pertumbuhan

ekonomi. Namun yang membedakan keduanya ialah pada skripsi ini akan membahas mengenai *Womenomics* tidak hanya berperan sebagai kebijakan pemulihan ekonomi, namun juga berperan sebagai kebijakan *gender mainstreaming*.

Literatur penelitian yang selanjutnya diambil dari skripsi Lea Florencia K., yang berjudul “Faktor Idiosinkratik dalam Kebijakan Luar Negeri Donald Trump terhadap Program Nuklir Iran”. Dalam tulisannya, Lea mengungkapkan bahwa setiap pemimpin negara atau presiden memiliki kepribadian, pola pikir, kepentingan, gaya, dan latar belakang yang berbeda-beda, yang mana perbedaan tersebut akan memberikan pengaruh yang besar pada setiap kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kasus tersebut Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang menggemparkan masyarakat internasional terutama Iran yaitu keluarnya AS dari Perjanjian JCPOA yang telah dibentuk sebelumnya pada masa pemerintahan Obama (Kurnia, 2019). Adapun persamaan dengan skripsi ini adalah keduanya akan membahas tentang peranan faktor idiosinkratik pada pemimpin negara. Namun yang membedakan ialah subjek penelitian yaitu faktor idiosionkratik pada Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.

Penelitian ini menggunakan konsep idiosinkratik dan konsep *gender mainstreaming*. Konsep idiosinkratik akan digunakan untuk menganalisis kepribadian seorang pemimpin, sementara itu *gender mainstreaming* digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Jepang terkait dengan gender.

### 1.5.2. Faktor Idiosinkratik

Peran kepribadian seorang pemimpin negara adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan setiap tindakan dan kebijakan negara yang dibuat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu *level of analysis* terkecil dalam studi Hubungan Internasional, yaitu individu atau idiosinkratik. Idiosinkratik merupakan istilah dari penggabungan kata *ideology* dan *syncretic*. Menurut Antonio Gramsci, *ideology* merupakan kerangka analisis untuk memahami dan menyelesaikan masalah, sedangkan *syncretic* adalah perpaduan yang baik dari semua yang ada. Artinya idiosinkratik adalah suatu kerangka analisis untuk memahami politik suatu negara yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pembuatan kebijakannya yang memberikan dampak yang berpengaruh (Rosenau, 2006).

Secara garis besar, idiosinkratik mempelajari hal-hal yang dapat memberikan pengaruh bagi seorang individu dalam membuat keputusan atau kebijakan suatu negara. Pada umumnya, idiosinkratik yaitu nilai, bakat, dan pengalaman (*past experience*) yang dimiliki oleh individu pembuat kebijakan. Menurut James Coulombis dan Wolfe, definisi faktor idiosinkratik adalah variabel yang memiliki kaitan dengan persepsi, citra, dan karakteristik individu. Sedangkan menurut Margaret Hermann, perilaku individu dapat dianalisa melalui berbagai faktor seperti karakter kepribadian yang dihasilkan oleh latar belakang serta pengalaman hidup individu. Proses penganalisaan tersebut dilakukan dengan cara analisis kognitif dan psikologis yang berhubungan satu dengan lainnya dalam mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan (Hermann M.G, 1980).

Idiosinkratik membahas beberapa aspek, yaitu latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, pengalaman (*past experience*), hubungan dengan elit politik, dan produksi pengetahuan yang dimiliki seorang pemimpin.

Pada aspek pertama yaitu latar belakang keluarga, dilakukan analisa pada status sosial keluarga, kondisi ekonominya, serta bagaimana hubungan sosialnya dengan masyarakat. Selanjutnya pada aspek analisa latar belakang pendidikan, peneliti akan melakukan analisa berdasarkan tempat dimana ia mengenyam pendidikan baik pendidikan formal maupun informal. Pada aspek yang ketiga dilakukan analisa berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang diterima selama hidupnya. Pada aspek yang keempat, peneliti akan melakukan analisa antara hubungan pemimpin dengan partai politiknya dan bagaimana ideologi yang dibentuk dapat menentukan keputusan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Dan aspek yang terakhir yaitu produksi pengetahuan yang dimiliki seorang pemimpin yang mana berhubungan dengan latar belakang kehidupan sosial dan pendidikan, namun analisa yang lebih spesifik kepada pengetahuan yang dimiliki seseorang kemudian mengubahnya menjadi pola pikir terhadap suatu permasalahan (Anugerah, 2016, p.8).

Selain itu, Margaret Hermann membagi karakteristik personal pemimpin menjadi dua tipe, yaitu pemimpin yang bersifat agresif dan pemimpin yang bersifat konsiliator. Tipe pemimpin yang bersifat agresif memiliki kecenderungan akan kebutuhan kekuasaan yang tinggi (*high need for power*), tetapi memiliki kompleksitas konseptual yang rendah (*low conceptual complexity*). Selain itu, pemimpin ini tidak mudah percaya (*high distrust to others*), bersifat nasionalis

(*high nationalism*) dan percaya bahwa mereka memiliki andil besar dalam peristiwa dimana mereka terlibat didalamnya (*high believe in own ability to control*). Sebaliknya, pemimpin dengan tipe konsiliator cenderung memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi (*high need of affiliation*), memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi (*high conceptual complexity*), mudah memercayai orang lain (*low distrust to others*), namun memiliki sikap nasionalis yang rendah (*low nationalism*), dan hanya sedikit percaya akan kemampuan mereka untuk mengendalikan peristiwa dimana mereka terlibat didalamnya (*little belief in own ability to control*) (Hermann, 1980). Singkatnya, tipe pemimpin agresif cenderung *self-centered* dan individual sedangkan tipe pemimpin konsiliator cenderung lebih bersahabat dan mengutamakan kerjasama.

### **1.5.3. Gender Mainstreaming**

Council of Europe (1998) dalam Walby (2005) mendefinisikan kesetaraan gender adalah visibilitas, pemberdayaan dan partisipasi yang setara antara kedua jenis kelamin di semua bidang kehidupan baik publik maupun pribadi. Kesetaraan gender berarti menerima dan menghargai secara setara perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan beragam peran yang mereka mainkan dalam masyarakat (Walby, 2005). Penelitian ini menggunakan konsep *Gender mainstreaming* untuk memahami proses promosi kesetaraan gender. Mieke Verloo seorang ketua dewan kelompok pakar *gender mainstreaming* (pengarusutamaan gender) Eropa, mendefinisikan *gender mainstreaming* adalah re-organisasi, perbaikan, pengembangan dan evaluasi proses kebijakan, sehingga perspektif tentang kesetaraan gender dimasukkan ke dalam semua kebijakan pada semua tingkatan

dan semua tahapan oleh para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan (Walby, 2005). Rai (2003) dalam Walby (2005) mengkonseptualisasikan *gender mainstreaming* sebagai proses demokratisasi gender yang melibatkan perempuan dan persepsi mereka sendiri tentang kepentingan politik dan proyek politik mereka ke dalam proses pembuatan kebijakan (Walby, 2005). Praktik *gender mainstreaming* yang terus-menerus dilakukan berhasil meningkatkan keterlibatan perempuan untuk menduduki posisi strategis di berbagai organisasi internasional seperti *World Health Organization* (WHO), *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), serta NGO Working Group for Women, Peace, and Security. NGOWG memiliki misi untuk membela, menganalisis, dan memberikan dampak atau pengaruh dalam pertemuan PBB terkait dengan perdamaian dan keamanan kaum perempuan. Praktik diplomatik yang dilakukan adalah berusaha untuk mempengaruhi perilaku negara-negara anggota PBB melalui negosiasi informal (NGO Working Group on Women, Peace, and Security, t.t.).

Terlepas dari tujuan kesetaraan gender, keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan internasional juga memberikan manfaat bagi negara yang sedang melakukan negosiasi. Kolb dan Coolidge (1991) berpendapat bahwa dalam proses negosiasi, perempuan cenderung berpandangan 'relasional' dengan orang lain dan perempuan lebih menyukai pemecahan masalah daripada laki-laki. Sementara itu, Florea et al (2003:230) berpendapat bahwa perempuan memiliki rasa empati yang tinggi sehingga lebih mampu melakukan negosiasi. Akademisi yang lain berpendapat bahwa pria dengan karakternya yang maskulin lebih kompetitif dan

menyukai dominasi, sedangkan perempuan dengan karakter feminine lebih memerlukan kerja sama dan inklusi.

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1. Faktor Idiosinkratik**

Faktor idiosinkratik adalah proses analisis yang digunakan untuk memahami karakteristik atau kepribadian seorang pemimpin negara yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Parameter yang digunakan menurut Margaret Hermann, yaitu latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman (*past experience*), hubungan dengan elit politik, dan produksi pengetahuan yang dimiliki seorang pemimpin (Hermann, 1980). Kemudian untuk memahami tipe pemimpin, Hermann menggolongkannya menjadi dua tipe, yaitu tipe agresif yang cenderung self-centered dan tipe konsiliator yang cenderung lebih bersahabat dan mementingkan kerjasama.

#### **1.6.1.2. Gender Mainstreaming**

Council of Europe mendefinisikan *gender mainstreaming* sebagai perbaikan, pengembangan dan evaluasi proses kebijakan agar perspektif tentang kesetaraan gender dimasukkan dalam semua kebijakan oleh para aktor pembuat kebijakan. Lebih lanjut, Rai (2003) mengkonseptualisasikan *gender mainstreaming* sebagai proses demokratisasi gender yang melibatkan perempuan dan

persepsi mereka terkait kepentingan politik ke dalam proses pembuatan kebijakan.

## **1.6.2. Definisi Operasional**

### **1.6.2.1. Faktor Idiosinkratik**

Faktor idiosinkratik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah karakteristik dan kepribadian yang dimiliki oleh pemimpin Jepang, yaitu Shinzo Abe. Kepribadian Abe memiliki pengaruh yang penting dalam menentukan atau membuat kebijakan suatu negara. Kemudian penulis juga akan menggolongkan tipe kepemimpinan Shinzo Abe masuk ke dalam tipe agresif atau konsiliator.

### **1.6.2.2. *Gender Mainstreaming***

*Gender mainstreaming* yang dimaksudkan dalam penelitian ini berfokus pada gender yang mana pemerintah Jepang menggunakan *womenomics* sebagai alat kebijakan luar negeri untuk mencapai kesetaraan gender secara global.

## **1.7. Argumen Penelitian**

Argumen dalam penelitian ini adalah *gender mainstreaming* dalam kebijakan *womenomics* dipengaruhi oleh kepribadian Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Kepribadian yang dihasilkan selama hidupnya memberikan pengaruh pada kebijakan luar negeri saat ia menjabat. Abe termasuk tipe pemimpin *conciliatory* yang mementingkan pemeliharaan hubungan kerja sama untuk mencapai sebuah tujuan, dalam hal ini penyelesaian masalah gender, salah satunya melalui

*womenomics*. Lebih lanjut, *womenomics* dijadikan sebagai fitur utama pemerintah Jepang untuk melakukan *gender mainstreaming*.

## **1.8. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis yang seringkali digunakan dalam kajian sosial untuk menjelaskan suatu masalah seperti pola perilaku dan motif dibalik perilaku manusia yang mana tidak dapat diukur dengan angka.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran yang lengkap terkait subjek, situasi, perilaku ataupun fenomena penelitian. Deskriptif digunakan dalam menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana terkait dengan masalah penelitian.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Sebagai bentuk penelitian kualitatif, penelitian ini akan menempatkan cakupannya pada negara Jepang sebagai tempat munculnya kebijakan *womenomics* yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Jepang. Lebih lanjut penelitian ini juga berusaha menjelaskan bagaimana penerapan *womenomics* di negara-negara berkembang yang memiliki isu gender.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus pada aksi, strategi, serta peran Shinzo Abe dalam pembentukan kebijakan *womenomics*.

### **1.8.4. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini berupa peristiwa atau kasus yang terjadi pada masyarakat sosial seperti tanggapan atas masalah kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Kemudian penelitian ini juga akan melihat bagaimana dinamika pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin negara.

### **1.8.5. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang relevan disertai dengan prinsip pencarian kata kunci dari publikasi, penelitian terdahulu, dan sumber berita terpercaya. Data-data yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk mempermudah proses pemahaman permasalahan dan analisis yang tercipta melalui fakta-fakta yang ada.

### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka atau *library research* untuk mengumpulkan bukti-bukti. Penulis akan mencari data sekunder yang relevan dengan penelitian berupa buku, laporan, jurnal, artikel, berita, teks pidato dan dokumen lainnya yang relevan dengan inti permasalahan lalu kemudian melakukan analisis berdasarkan literatur tersebut.

### 1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode *content analysis*. *Content analysis* atau analisis isi adalah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks dan dapat direplikasi (ditiru) dengan memanfaatkan konteksnya (Krippendorff, 1991). Jenis *content analysis* yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan menggunakan analisis wacana (*discourse analysis*). *Discourse analysis* dirasa lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena proses analisisnya dengan mengkaji wacana (*discourse*) yang terkandung dalam komunikasi secara tekstual maupun kontekstual atau dengan kata lain analisis wacana lebih menekankan pemaknaan teks (Ahmad, 2018).